

## PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Delviro El Masir<sup>1</sup>, Wahyu Reza Saputra<sup>2</sup>, Funny Oktara Pradina<sup>3</sup>, Chantika Octa Zafira<sup>4</sup>,  
Novely Chera<sup>5</sup>, Dina Rosalia<sup>6</sup>, Renza Irena Putri<sup>7</sup>

<sup>1, 2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

<sup>3,4,5,6,7</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

E-mail : [ddelviro@gmail.com](mailto:ddelviro@gmail.com)<sup>1</sup>, [rezasaputra74132@gmail.com](mailto:rezasaputra74132@gmail.com)<sup>2</sup>, [funnyoktara@gmail.com](mailto:funnyoktara@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[chantikaoctaz@gmail.com](mailto:chantikaoctaz@gmail.com)<sup>4</sup>, [novelycher08@gmail.com](mailto:novelycher08@gmail.com)<sup>5</sup>, [rosaliadina672@gmail.com](mailto:rosaliadina672@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[renzairena726@gmail.com](mailto:renzairena726@gmail.com)<sup>7</sup>

### Abstrak

Ideologi negara merupakan landasan fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, Pancasila berperan sebagai ideologi negara sekaligus dasar negara yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebagai ideologi, Pancasila tidak hanya menjadi simbol normatif, tetapi juga berfungsi sebagai sistem nilai yang harus diimplementasikan dalam setiap tindakan dan kebijakan bangsa. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa menuntut pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membangun karakter bangsa yang berintegritas, berkeadilan, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Namun, tantangan globalisasi, modernisasi, serta perkembangan teknologi informasi menuntut adaptasi baru dalam penerapan ideologi Pancasila agar tetap relevan dengan dinamika zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Dengan demikian, penguatan implementasi ideologi Pancasila perlu dilakukan melalui pendidikan, kebijakan publik, dan keteladanan pemimpin agar nilai-nilai Pancasila senantiasa hidup dan membumi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

**Kata kunci:** Ideologi negara, Pancasila, implementasi, kehidupan berbangsa, nilai-nilai Pancasila.

### Abstract

*State ideology is a fundamental foundation that serves as a guideline for the organization of national and state life. In Indonesia, Pancasila serves as the state ideology and the foundation of the state, guiding all aspects of social life, including politics, economics, social affairs, and culture. As an ideology, Pancasila is not merely a normative symbol but also serves as a value system that must be implemented in every national action and policy. Implementing Pancasila in national life requires a deep understanding of the noble*

### Article History

Received: November 2025  
Reviewed: November 2025  
Published: November 2025

Plagiarism Checker No  
234.54757h  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365  
Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*values it embodies, such as divinity, humanity, unity, democracy, and social justice. These values serve as guidelines for building a national character that is imbued with integrity, justice, and upholds unity. However, the challenges of globalization, modernization, and the development of information technology require new adaptations in the application of Pancasila ideology to remain relevant to the dynamics of the times without losing the nation's identity. Therefore, strengthening the implementation of Pancasila ideology needs to be done through education, public policy, and the exemplary behavior of leaders so that Pancasila values remain alive and grounded in every aspect of Indonesian society.*

**Keywords:** *State ideology, Pancasila, implementation, national life, Pancasila values.*

## PENDAHULUAN

Ideologi negara merupakan fondasi fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi pedoman dalam menjalankan sistem pemerintahan serta mengatur kehidupan masyarakat. Setiap negara memiliki ideologi yang menjadi dasar filosofis dan panduan dalam mengambil kebijakan serta menentukan arah pembangunan nasional.<sup>1</sup> Ideologi negara tidak hanya berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, tetapi juga sebagai identitas yang membedakan satu bangsa dengan bangsa lainnya dalam konstelasi global. Indonesia sebagai negara yang majemuk dengan berbagai suku, agama, ras, dan golongan memerlukan ideologi yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia lahir dari proses historis panjang dan merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu.<sup>2</sup> Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari perjuangan para pendiri bangsa yang menggali nilai-nilai fundamental untuk menjadi dasar negara yang mampu mengakomodasi keberagaman. Dalam konteks kehidupan berbangsa, implementasi ideologi negara menjadi aspek krusial yang menentukan keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya. Implementasi ideologi tidak hanya menyangkut aspek formal-konstitusional, tetapi juga harus menyentuh dimensi praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tantangan implementasi ideologi di era kontemporer semakin kompleks dengan adanya arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan dinamika politik yang terus berubah.<sup>3</sup>

Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki karakteristik yang membedakannya dengan ideologi tertutup seperti liberalisme, komunisme, atau fundamentalisme agama. Ideologi terbuka memungkinkan adanya interpretasi dan aplikasi yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.<sup>4</sup> Keterbukaan ini memberikan ruang bagi bangsa Indonesia untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan global sambil tetap mempertahankan jati diri sebagai bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial. Permasalahan yang muncul dalam implementasi Pancasila, munculnya ideologi alternatif yang bertentangan dengan Pancasila, hingga praktik kehidupan berbangsa yang menyimpang dari nilai-nilai ideologi negara.<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Paradigma,2013), hlm 45.

<sup>2</sup>Notonagoro, *Pancasila : Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara,1983), hlm 12.

<sup>3</sup>Misno, *Pancasila dan Tantangan Globalisasi : Relevansi Ideologi Bangsa di Era Modern*, (Yogyakarta : Deepublish.

<sup>4</sup>Agus, A. A.(2016). Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka di Era Reformasi. *Jurnal Office*, 2(2), hlm.229-238.

<sup>5</sup>Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : Gramedia 2011), hlm. 210.

Fenomena radikalisme, intoleransi, korupsi, dan ketimpangan sosial menunjukkan bahwa implementasi Pancasila belum optimal dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang ideologi negara dan implementasinya menjadi sangat penting untuk memperkuat fondasi kehidupan berbangsa di Indonesia. Dalam perspektif historis, Pancasila telah mengalami berbagai ujian dan tantangan sejak kemerdekaan Indonesia. Mulai dari pergolatan ideologi pada masa demokrasi liberal, penyelewengan pada masa Orde Lama dan Orde Baru, hingga tantangan di era reformasi yang memberikan kebebasan lebih luas namun juga membuka peluang munculnya berbagai paham yang bertentangan dengan Pancasila.<sup>6</sup>Pengalaman historis ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga dan mengimplementasikan ideologi negara secara konsisten dan konsekuen. Dimensi implementasi ideologi negara mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa, meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam bidang politik, implementasi Pancasila harus terwujud dalam sistem demokrasi yang berdasarkan pada musyawarah mufakat dengan tetap menghormati hak hak asasi manusia. Dalam bidang ekonomi, prinsip keadilan sosial mengharuskan terciptanya sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dalam bidang sosial budaya, Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang beradap, toleran, dan menghargai keberagaman. Peran berbagai elemen bangsa dalam mengimplementasikan ideologi negara sangat strategis. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan Nilai-nilai Pancasila.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep dan hakikat ideologi negara dalam perspektif teoritis dan konteks kebangsaan Indonesia?
2. Bagaimana proses historis pembentukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan dinamika implementasinya dari masa ke masa?
3. Apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi ideologi negara di era kontemporer?
4. Bagaimana strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi ideologi negara dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam tentang Pancasila sebagai ideologi negara serta implementasinya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

## TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis dan menjelaskan konsep ideologi negara secara komprehensif serta kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dalam perspektif teoretis praktis.
2. Menelusuri dan menganalisis proses historis pembentukan Pancasila serta dinamika implementasinya dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era reformasi.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tantangan, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi ideologi negara di era kontemporer dengan berbagai kompleksitasnya.
4. Merumuskan strategi, upaya, dan rekomendasi konkret untuk mengoptimalkan implementasi ideologi negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa guna memperkuat ketahanan ideologi dan jati diri bangsa Indonesia.

---

<sup>6</sup>Effendi Bachrul, *Pancasila dalam Dinamika Ketatanegaraan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 78-80.

5. Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya revitalisasi Pancasila sebagai ideologi negara yang relevan dengan tantangan zaman namun tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalamnya.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep dan Hakikat Ideologi Negara

Ideologi secara etimologis berasal dari kata Yunani "*idea*" yang berarti gagasan, konsep, atau pengertian dasar, dan "*logos*" yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dalam perkembangannya, ideologi dipahami sebagai sistem pemikiran yang komprehensif tentang manusia dan masyarakat, yang memberikan orientasi dan arah tindakan bagi individu maupun kelompok. Ideologi bukan sekadar kumpulan ide atau gagasan yang terpisah-pisah, melainkan suatu kesatuan sistematis yang saling berkaitan dan membentuk pandangan dunia (*weltanschauung*) yang utuh.<sup>7</sup>

Dalam konteks kenegaraan, ideologi negara merupakan seperangkat nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. Ideologi negara berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan tujuan nasional, membuat kebijakan publik, serta mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Lebih dari itu, ideologi negara juga berfungsi sebagai integrator yang menyatukan berbagai elemen bangsa yang heterogen menjadi satu kesatuan yang solid.<sup>8</sup> Terdapat berbagai klasifikasi ideologi dalam literatur ilmu politik dan filsafat. Salah satu klasifikasi yang banyak digunakan adalah pembagian antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ideologi yang memiliki karakteristik dogmatis, absolut, dan tidak memberikan ruang untuk interpretasi atau penyesuaian dengan perkembangan zaman. Contoh ideologi tertutup adalah ideologi terbuka memiliki karakteristik yang fleksibel, dinamis, dan memberikan ruang untuk interpretasi serta aplikasi yang kontekstual tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamentalnya.

Fungsi ideologi negara sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara :

1. fungsi integratif, yaitu menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang beragam latar belakangnya menjadi satu kesatuan bangsa. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, fungsi integratif Pancasila sangat penting untuk mencegah disintegrasi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. fungsi orientatif, yaitu memberikan arah dan tujuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan visi tentang masyarakat Indonesia yang ideal, yaitu masyarakat yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial.
3. fungsi legitimatif, yaitu memberikan landasan moral dan hukum bagi kekuasaan negara. Kekuasaan negara yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan mendapat legitimasi dari rakyat. Sebaliknya, penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila akan mengurangi legitimasi pemerintahan.
4. fungsi kritik, yaitu menjadi standar untuk menilai apakah kebijakan dan tindakan pemerintah sudah sejalan dengan nilai-nilai ideologi negara atau belum. Masyarakat dapat menggunakan Pancasila sebagai alat kritik terhadap kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai dasar bangsa.

Kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat fundamental. Pancasila adalah dasar negara (*staatsfundamentalnorm* atau *grundnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam hierarki norma hukum, Pancasila berada pada posisi tertinggi, diikuti oleh Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan lainnya. Semua produk hukum di Indonesia harus

---

<sup>7</sup> Soerjanto Poespowardojo, *Fisafar Pancasila: Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 45.

<sup>8</sup>Maesaroh, S., "The Ideology of the State and Direction of Development as the Foundation of Public Policy: Islamic Perspective," *International Journal of Islamic Studies and Society (IJISS)*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 15–26.

bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.<sup>9</sup> mengandung nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Nilai-nilai tersebut digali oleh para pendiri bangsa dari kekayaan budaya nusantara, ajaran agama, dan pengalaman historis bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.

Selain itu, Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kepribadian ini tercermin dalam cara bangsa Indonesia menghadapi berbagai persoalan, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan antarwarga negara maupun dengan bangsa lain<sup>10</sup>. Nilai-nilai gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, dan kebersamaan merupakan manifestasi dari kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila.

## B. Pancasila dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional

Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi dasar dalam konsep hukum di Indonesia. Konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Implementasi prinsip Pancasila sebagai landasan politik hukum Indonesia telah menjadi subjek penting dalam berbagai kajian yuridis. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia memastikan Indonesia.<sup>11</sup> Hal ini penting untuk menjaga konsistensi antara nilai-nilai dasar bangsa dengan implementasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

## C. Proses Historis Pembentukan Pancasila

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses historis yang panjang. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah hidup dan berkembang dalam masyarakat nusantara jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Nilai ketuhanan tercermin dalam kehidupan spiritual masyarakat nusantara yang religius, nilai kemanusiaan terlihat dalam sikap menghargai martabat manusia, nilai persatuan terwujud dalam semangat kebersamaan dan gotong royong, nilai demokrasi terlihat dalam tradisi musyawarah mufakat, dan nilai keadilan sosial tercermin dalam sistem distribusi ekonomi yang berkeadilan dalam masyarakat tradisional.

Pada masa pergerakan nasional, para pemikir dan pemimpin pergerakan telah mulai merumuskan konsep dasar negara Indonesia yang akan didirikan. Organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan lain-lain meskipun memiliki ideologi yang berbeda-beda, namun memiliki satu kesamaan yaitu cita-cita kemerdekaan Indonesia.<sup>12</sup> Dalam perkembangannya, muncul kesadaran akan perlunya menemukan titik temu atau konsensus nasional yang dapat mengakomodasi berbagai aliran pemikiran yang ada.

Momentum penting dalam perumusan Pancasila terjadi pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Moh. Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan lima asas dasar negara: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.<sup>13</sup>

Pidato yang paling monumental adalah pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai "Hari Lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya yang berjudul "Lahirnya

<sup>9</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 45.

<sup>10</sup>Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 27.

<sup>11</sup> Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 122.

<sup>12</sup> Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 73.

<sup>13</sup> Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid 1 (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), hlm. 52.

Pancasila", Soekarno mengusulkan lima dasar negara yang disebutnya dengan istilah Pancasila, yaitu: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Soekarno menekankan bahwa kelima sila tersebut bukan hanya berlaku untuk orang Indonesia saja, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua golongan.

Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta memuat rumusan dasar negara yang pada awalnya mencantumkan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Namun, setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, terjadi perubahan rumusan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk mengakomodasi keberatan dari wakil-wakil Indonesia Timur yang sebagian besar non-Muslim.<sup>15</sup> Perubahan ini menunjukkan jiwa besar para pendiri bangsa yang mengutamakan persatuan di atas kepentingan golongan.

#### D. Dimensi Implementasi Ideologi Negara dalam Kehidupan Berbangsa

##### 1. Dimensi Politik dan Pemerintahan

Implementasi Pancasila dalam dimensi politik harus terwujud dalam sistem demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal yang lebih menekankan pada kebebasan individu tanpa batas, maupun demokrasi sosialis yang cenderung mengekang kebebasan individual demi kepentingan kolektif.

Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Mekanisme voting atau suara terbanyak hanya digunakan apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Prinsip ini tercermin dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem demokrasi perwakilan dengan tetap menghormati aspirasi rakyat. Namun dalam praktiknya, mekanisme musyawarah seringkali terabaikan dan digantikan dengan mekanisme voting yang cenderung menghasilkan keputusan mayoritas tanpa mempertimbangkan kepentingan minoritas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, implementasi Pancasila harus tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan publik harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sayangnya, masih banyak kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kebijakan yang diskriminatif, menguntungkan segelintir orang, atau mengabaikan hak-hak rakyat kecil.

Partai politik sebagai pilar demokrasi juga memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan Pancasila. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, setiap partai politik harus mencantumkan Pancasila sebagai asas partai. Namun dalam praktiknya, masih banyak partai politik yang menggunakan ideologi lain atau bahkan bertentangan dengan Pancasila dalam platform dan aktivitas politiknya. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap Pancasila masih sebatas formal dan belum substantif.

##### 2. Dimensi Ekonomi

Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", mengandung implikasi penting dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia harus mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang. Ekonomi Pancasila menolak sistem ekonomi kapitalisme liberal yang cenderung menghasilkan ketimpangan, namun juga menolak sistem ekonomi sosialisme yang mematikan inisiatif dan kreativitas individu.

<sup>14</sup>Soekarno, *Lahirnya Pancasila* (Jakarta: Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1945/1959), hlm. 17.

<sup>15</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Tentang Perdebatan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 24.

Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi sistem ekonomi Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Namun dalam implementasinya, sistem ekonomi Indonesia masih jauh dari cita-cita ekonomi Pancasila. Ketimpangan ekonomi semakin melebar, kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara kemiskinan masih melanda jutaan rakyat Indonesia. Liberalisasi ekonomi yang dilakukan sejak era reformasi telah membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya kapital asing tanpa kendali yang memadai, sehingga menggerus kedaulatan ekonomi nasional. Banyak sumber daya alam Indonesia dikuasai dan dieksploitasi oleh korporasi asing atau konglomerat yang lebih mengutamakan keuntungan daripada kesejahteraan rakyat.

Implementasi ekonomi Pancasila memerlukan peran aktif negara dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian untuk mencegah eksploitasi dan memastikan keadilan distribusi. Konsep ekonomi kerakyatan yang berbasis pada koperasi dan usaha kecil menengah harus diperkuat sebagai soko guru perekonomian nasional. BUMN juga harus menjalankan fungsinya bukan sekadar mencari profit, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.

### 3. Dimensi Sosial dan Budaya

Dalam dimensi sosial, implementasi Pancasila harus menciptakan masyarakat yang berkemanusiaan, toleran, dan menghargai keberagaman. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", mengandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Indonesia sebagai negara yang majemuk harus menjaga keharmonisan hubungan antarkelompok masyarakat berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Namun realitas menunjukkan bahwa konflik sosial berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) masih sering terjadi. Munculnya kelompok-kelompok intoleran yang menyebarkan kebencian terhadap kelompok lain merupakan ancaman serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih terjadi di berbagai daerah, baik dalam bentuk pembatasan hak-hak sipil maupun kekerasan fisik.

Dalam dimensi budaya, Pancasila harus menjadi filter terhadap masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi memudahkan penetrasi budaya asing yang bisa menggerus nilai-nilai budaya lokal. Budaya konsumerisme, individualisme, dan hedonisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila semakin merebak dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi kunci dalam menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada generasi muda. Sistem pendidikan nasional harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap mata pelajaran, bukan hanya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Metode pembelajaran harus lebih menekankan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar hafalan teks.

### 4. Dimensi Hukum dan Keadilan

Sila kelima Pancasila menghendaki terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam dimensi hukum, ini berarti bahwa sistem hukum Indonesia harus mampu memberikan keadilan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Prinsip *equality before the law* harus ditegakkan, semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai keadilan Pancasila.

Fenomena "hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah" masih sering terjadi, di mana orang kaya dan berkuasa dapat dengan mudah lolos dari jeratan hukum, sementara rakyat kecil harus menanggung hukuman yang berat untuk pelanggaran yang relatif ringan. Mafia

peradilan yang melibatkan oknum aparat penegak hukum telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. usak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Korupsi yang masih merajalela di berbagai lembaga negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial. Korupsi merampas hak-hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan mengalihkan sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat ke kantong-kantong pribadi para koruptor.

## **E. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa**

### **Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa**

Implementasi sila pertama dalam kehidupan berbangsa tercermin dalam jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap warga negara. Negara memberikan perlindungan terhadap enam agama yang diakui secara resmi, namun juga memberikan ruang bagi kepercayaan lainnya. Dalam praktiknya, nilai-nilai ketuhanan diterapkan melalui sikap toleransi antar umat beragama, penyelenggaraan pendidikan agama, dan pengakuan hari-hari besar keagamaan sebagai hari libur nasional.

Di lingkungan masyarakat, implementasi sila pertama dapat dilihat dari kebiasaan bergotong-royong dalam membangun tempat ibadah, saling menghormati saat perayaan hari besar keagamaan, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Dalam konteks pemerintahan, setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan dimensi spiritual dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan.

### **Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Sila kedua mengajarkan tentang penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Implementasinya dalam kehidupan berbangsa terlihat melalui berbagai kebijakan perlindungan hak asasi manusia, seperti penghapusan diskriminasi, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penegakan keadilan sosial. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai kemanusiaan diimplementasikan melalui sikap saling menghargai perbedaan, membantu sesama yang membutuhkan, dan menolak segala bentuk kekerasan. Gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan seperti donor darah, bantuan kemanusiaan untuk korban bencana, dan program-program sosial lainnya merupakan manifestasi nyata dari sila kedua.

### **Sila Ketiga: Persatuan Indonesia**

Persatuan Indonesia dalam kebhinnekaan merupakan kekuatan utama bangsa ini. Implementasi sila ketiga tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang mengakui keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, namun tetap dalam satu kesatuan Indonesia. Kebijakan otonomi daerah, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan perayaan hari-hari besar nasional merupakan wujud implementasi nilai persatuan.

Dalam konteks sosial kemasyarakatan, persatuan dibangun melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang. Organisasi kepemudaan, kegiatan seni dan budaya yang memadukan berbagai tradisi lokal, serta kompetisi olahraga tingkat nasional menjadi sarana memperkuat persatuan bangsa.

### **Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Sila keempat mengandung prinsip demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Implementasinya terlihat dalam sistem pemerintahan yang demokratis, di mana rakyat memiliki kedaulatan tertinggi melalui mekanisme pemilihan umum. Proses

pengambilan keputusan yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat mencerminkan nilai-nilai demokratis yang berakar pada budaya bangsa.

Dalam praktik bernegara, sila keempat diimplementasikan melalui berbagai lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, DPD, dan DPRD yang menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Di tingkat desa, musyawarah desa menjadi forum pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Prinsip demokrasi juga diwujudkan melalui kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan jaminan hak-hak politik warga negara.

#### Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima mengandung cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Implementasinya dapat dilihat dari berbagai program pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, seperti program jaminan sosial, bantuan langsung tunai, kartu Indonesia Sehat, dan kartu Indonesia Pintar. Pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, pembangunan infrastruktur yang merata, dan upaya pemerataan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia merupakan bentuk perwujudan keadilan sosial.

Dalam kehidupan masyarakat, nilai keadilan sosial diterapkan melalui tradisi gotong-royong, sistem ekonomi kerakyatan seperti koperasi, dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Perusahaan-perusahaan juga menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) sebagai wujud kontribusi terhadap keadilan sosial<sup>16</sup>.

#### F. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Modern

Era globalisasi dan digitalisasi membawa tantangan tersendiri dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Masuknya budaya asing, paham radikalisme, intoleransi, dan melemahnya nilai-nilai gotong-royong menjadi ancaman bagi eksistensi Pancasila. Selain itu, kesenjangan sosial-ekonomi yang masih tinggi, korupsi, dan melemahnya karakter bangsa juga menjadi tantangan dalam mewujudkan Pancasila sebagai *way of life* bangsa Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat juga membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, teknologi memudahkan akses informasi dan komunikasi, namun di sisi lain dapat menjadi sarana penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, seperti radikalisme, ujaran kebencian, dan hoaks yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

#### G. Revitalisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, revitalisasi Pancasila menjadi suatu keharusan. Revitalisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

1. Pendidikan Pancasila yang Kontekstual: Pembelajaran Pancasila tidak hanya sebatas hafalan dan teori, tetapi harus dikaitkan dengan permasalahan aktual yang dihadapi bangsa. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila perlu diintegrasikan dalam seluruh jenjang pendidikan.
2. Keteladanan Pemimpin: Para pemimpin di berbagai tingkatan harus menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Integritas, kejujuran, dan dedikasi dalam melayani masyarakat merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila.
3. Penguatan Peran Masyarakat Sipil: Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mensosialisasikan dan mengawal implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Dialog antaragama, diskusi publik, dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dapat menjadi media efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila.
4. Reformasi Hukum dan Kebijakan: Sistem hukum dan kebijakan publik harus benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Penegakan hukum yang adil, kebijakan yang pro-

---

<sup>16</sup> Rahma, A. N., & Dewi, D. A. (2021). *Implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari*.

rakyat, dan pemberantasan korupsi merupakan wujud komitmen negara terhadap Pancasila.

## ANALISIS EMPIRIS

Analisis empiris menitikberatkan pada fakta sosial dan realitas objektif yang terjadi dalam implementasi ideologi negara, yakni Pancasila. Dalam praktik kehidupan berbangsa, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku masyarakat maupun penyelenggara negara. Fenomena menurunnya semangat gotong royong, meningkatnya intoleransi, dan melemahnya etika publik menjadi cerminan bahwa Pancasila sebagai ideologi belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga membawa pengaruh besar terhadap perubahan nilai dan perilaku masyarakat. Arus budaya asing yang masuk tanpa filter sering kali menggeser nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda.<sup>17</sup> Namun demikian, upaya pemerintah seperti penguatan pendidikan Pancasila, program Pembinaan Ideologi Pancasila oleh BPIP, serta kegiatan kebangsaan di lembaga pendidikan dan masyarakat merupakan langkah konkret untuk mengembalikan nilai-nilai ideologi negara dalam kehidupan berbangsa. Dari sudut pandang empiris, masih terdapat kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dan realitas sosial.<sup>18</sup> Untuk mengatasinya, dibutuhkan sinergi antara pendidikan, kebijakan publik, serta keteladanan moral dari para pemimpin bangsa agar Pancasila benar-benar menjadi pedoman hidup yang membumi di tengah masyarakat.

## ANALISIS NORMATIF

Secara normatif, Pancasila adalah dasar negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hal ini berarti seluruh kebijakan, peraturan, dan perilaku penyelenggara negara wajib bersumber dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai normatif Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menjadi arah ideal dalam membangun kehidupan berbangsa yang berkeadilan dan berkeadaban.<sup>19</sup> Dalam kerangka normatif ini, implementasi ideologi negara menuntut adanya komitmen moral, etika pemerintahan, dan tanggung jawab sosial agar setiap aspek kehidupan nasional tidak menyimpang dari nilai dasar Pancasila. Dengan demikian, secara normatif, ideologi negara berfungsi sebagai panduan nilai dan arah moral bangsa, sedangkan secara empiris berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap praktik kehidupan berbangsa dan bernegara agar senantiasa berada pada jalur yang sesuai dengan cita-cita nasional.

## KESIMPULAN

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki kedudukan fundamental sebagai dasar filosofis dan pandangan hidup bangsa yang mengikat seluruh warga negara. Kelima sila dalam Pancasila - Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia - bukan sekadar simbol, melainkan nilai-nilai luhur yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Dalam bidang politik, Pancasila menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Dalam kehidupan sosial, nilai-nilai Pancasila mendorong terciptanya masyarakat yang toleran, gotong royong, dan

---

<sup>17</sup>Ahmad Syafii Maarif, *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pancasila* (Jakarta: Kompas, 2014) hlm. 57.

<sup>18</sup>Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Laporan Tahunan BPIP 2022: *Revitalisasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa* (Jakarta: BPIP, 2022), hlm. 45.

<sup>19</sup>Notonagoro, *Pancasila: Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 45; dan Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 128.

menghargai keberagaman. Di bidang ekonomi, Pancasila mengarahkan pada sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial. Sementara dalam aspek hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila di era modern semakin kompleks, mulai dari pengaruh globalisasi, radikalisme, korupsi, hingga memudarnya nilai-nilai gotong royong. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh komponen bangsa untuk terus memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter berbasis Pancasila, keteladanan dari para pemimpin, serta kesadaran setiap individu untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci keberhasilan menjaga Pancasila sebagai ideologi negara yang tetap relevan dan hidup di tengah masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Hasan Zainudin (2025). *Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

### Jurnal :

Alfian, Politik dan Pemerintahan di Indonesia, (Jakarta: Gramedia), 1991.

Arifin, Z, *Pancasila dan Hal Asasi Manusia : Studi Kritis atas Nilai-nilai Universal*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18 No.1, (2021), hlm.78.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). *Buku Saku Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta : BPIP RI, 2020.

Bakry, Noor Ms. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Dardiri, Ahmad, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jurnal Filsafat dan Ideologi, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 89.

Effendi, Bachrul. Pancasila Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3 (2014): 495-512.

Hasan, Zainudin, et al. "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2.1 (2024): 44-54.

Hasan, Zainudin, et al. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2.2 (2024): 138-150.

Jimly Asshiddiqie, *Ideologi Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48 No. 3, 2021.

Kaelan, M.S. *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Paradigma), 2013.

M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jilid 1, (Jakarta: Yayasan Prapantja), 1959.

Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Grafiti, 1995.

Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta : Pantja Simpati), 1997.

Soekarno, *Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, (Jakarta: BPUPKI), 1945.

Soerjanto Poespowardjo, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Jakarta: Gramedia), 1987.

Suryohadiprojo, Sayidiman, *Refleksi tentang Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 2010.

Suyahmo, S., & Sumaryono, E. (2018). *Filsafat Pancasila dalam Konteks Sejarah, Ketatanegaraan, dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Wibisono, M. (2020). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Era Globalisasi*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 145-157.

Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015).